

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Organisasi masyarakat Islam selalu memainkan peran strategis dalam konstelasi politik Indonesia<sup>1</sup>. Misalnya Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri tahun 1926. Sejak berdirinya, kelompok Islam ini tidak hanya menebar pengabdian kepada gerakan-gerakan keagamaan tetapi juga dalam ranah politik Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan organisasi Islam terbanyak yang didirikan di sana. Mulai dari pergaulan Islam yang bersifat tradisional, moderat hingga kekinian merangkul pemikiran yang dibawa ke dunia di barat dengan ide-ide liberal dan umum. Dalam demokrasi yang kuat, masing-masing dapat berkembang dan memperjuangkan cita-citanya. Menurut temuan survei yang dilakukan Indobarometer, NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia mewakili sebanyak 75% dari total populasi Muslim di Indonesia.

Sebagai perhimpunan Islam yang memiliki peranan politik, NU juga menjalankan fungsi politik. Di Indonesia, arus demokratisasi selalu digalakkan semenjak tumbanganya rezim Orde Baru yang memudahkan seluruh komponen sistem politik Indonesia untuk terlibat. Tentunya kondisi ini membutuhkan masyarakat yang tidak hanya berkecimpung tetapi juga terampil dalam mendorong terwujudnya bangsa yang diinginkan. Akibatnya, tidak hanya partai politik dan organisasi formal pemerintah yang berperan aktif dalam pendidikan

---

<sup>1</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara, Dan Demokras* (Yogyakarta: Galang Press, 2001). hlm 9.

politik masyarakat, tetapi juga semua anggota masyarakat lainnya, khususnya lembaga swadaya masyarakat<sup>2</sup>.

Dalam menjalankan tugasnya, NU melakukan banyak pendidikan politik yang dipengaruhi oleh konflik arus filosofis mengenai hubungan antara pemimpin agama dan pemimpin politik, atau kyai. Dalam kebanyakan kasus, kyai adalah gelar yang dipegang oleh individu yang memiliki kelebihan dalam pengetahuan agama Islam. Mereka mendominasi pengaruh budaya dan memainkan peran penting dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).

Kehadiran kyai dalam masyarakat sangat penting karena tiga faktor, yaitu Pertama, mobilitas kyai yang tinggi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar, baik melalui pertemuan dengan jaringan tertentu maupun dengan kyai lain. Mereka dapat memperoleh informasi yang berguna tentang lingkungan mereka sebagai hasil dari ini. Kedua, posisi sentral dan sosok dari kyai di lingkungan masyarakat apalagi di pesantrennya, menjadikan mereka sumber untuk pegangan hidup masyarakat. Ketiga, kyai biasanya memiliki keunggulan materi dibandingkan lingkungan masyarakat, termasuk akses informasi yang lebih baik, sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari posisinya<sup>3</sup>.

Filosofi politik NU dapat diringkas dalam beberapa kata sederhana dengan melihat kebangkitan mereka di kancah politik Indonesia setelah kemerdekaan. Tercatat, NU bergabung dengan Partai Masyumi pada tahun 1949 dan aktif berpolitik sejak saat itu. Selain itu, filosofi politik NU dapat ditelusuri kembali

---

<sup>2</sup> Muhammad Farhanuddin, "Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pendidikan Politik Di Kabupaten Majene," *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 2 (2017). hlm 152.

<sup>3</sup> Laode Ida, *Kaum Muda NU, Kaum Progresif Dan Sekulerisme Baru* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004). hlm 5.

pada pemahaman keberagamaan *Ahl al-Sunnah wa al-jamaah* atau *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* (*Aswaja*), yang memiliki tiga semangat utama: kebijaksanaan, keluwesan, dan moderasi<sup>4</sup>. Setiap semangat utama NU dalam berpolitik makna masing-masing.

Pertama, kebijaksanaan dipandang sebagai upaya membina lingkungan yang positif dan menghindari keburukan. Doktrin *Nahdlatul Ulama* (NU) berpandangan bahwa menjauhi mudharat lebih utama daripada berbuat baik. Saat dihadapkan pada dua pilihan sulit, yang memiliki risiko lebih rendah diprioritaskan dan dilarang menghilangkannya dengan bahaya. Kedua, keluwesan dapat dilihat sebagai kemauan untuk berubah seiring dengan waktu dan konteks sosial dan politik di mana seseorang berada. Itu tidak pernah menegaskan sesuatu yang mutlak. Konsep Islam *rahmatan lil alamin* berpandangan bahwa semua orang harus dapat menerima Islam dan menerima rahmat. Akibatnya, doktrin NU menyarankan mengambil kebijakan bagaimana mereka bisa diterima di masyarakat tanpa meninggalkan aturan ajaran Islam dalam situasi di mana Islam sulit diterima. Ketiga, upaya menghindari ekstremisme dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dimaknai sebagai moderatisme. Pendekatan ini mengalahkan ide politik NU untuk mengurangi pertikaian antara Islam garis keras dan patriot membuat keadaan politik yang menyenangkan dan terkoordinasi<sup>5</sup>.

Jalan yang ditempuh NU untuk menjalankan perannya adalah penjabaran ringkas pandangan politik NU di atas. Tak terkecuali di Kabupaten Tasikmalaya, salah satu kabupaten yang menjadi basis massa NU di Jawa Barat. Tradisi agama

---

<sup>4</sup> Sulthan Fatoni, *NU: Identitas Islam Indonesia* (Jakarta: Elsas, 2004).hlm 131.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik and Jonaedi Efend, *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2008).

dan budaya NU sangat kental di Kabupaten Tasikmalaya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Misalnya, kegiatan rutin Maulid Nabi Muhammad SAW kecamatan dan desa di Kabupaten Tasikmalaya, pengajian barzanji di saat-saat penting masyarakat, zikir berjamaah di masjid-masjid, *Halaqoh* kebangsaan dan masih banyak lagi tradisi lainnya yang semuanya merupakan bagian dari budaya religi NU. yang sangat diikuti oleh komunitas Muslim Kabupaten Tasikmalaya.

NU di Tasikmalaya diawali oleh KH Abdullah Ubaid yang berangkat ke Tasikmalaya untuk menyampaikan pidato di Masjid Agung Tasikmalaya, yang menandai dimulainya semangat NU. Ia membahas kebijakan kolonial Belanda mengenai penyuntikan jenazah saat itu. Dia menyatakan dalam pidatonya di masjid bahwa adalah melanggar hukum untuk menyuntikkan mayat. Polisi kolonial hampir membuat pembicara bertekuk lutut jika tidak melanjutkan kalimat, "Kecuali sangat dibutuhkan," dalam pidato yang mendapat tepuk tangan meriah dari hadirin. Para ajengan di Tasikmalaya terdorong untuk bergabung dengan Nahdlatul Ulama melalui acara ini.

Selain itu, KH Fadlil dari Cikotok Parigi yang kemudian menetap di Nagarawangi membawa NU ke Tasikmalaya sekitar tahun 1928. Pesantren menyambut kehadiran NU di Tasikmalaya dengan tangan terbuka karena kesamaan budaya antara NU dan pesantren. Setelah itu bergabung dengan NU para Ajengan Tasikmalaya. KH. O. Qolyubi dari Pesantren Madewangi Tamansari. KH. Syabandi dari Pesantren Cilenga. KH. Dahlan Pasantren Cicarulang, KH Roehiat dari Pasantren Cipasung KH. Yahya dari Pesantren

Madiapada, KH. Samsuudin Pasantren Gegernoong, KH. Zainal Mustofa Pasantren Sukamanah, dan Kyai lainnya<sup>6</sup>.

Pertemuan di kediaman KH M. Fadlil atau KH Dimiyati Nagarawangi menandai awal berdirinya NU secara resmi di Tasikmalaya. Diputuskan dalam rapat bahwa KH. Rais Syuriah NU Tasikmalaya oleh Ketua Tanfidzy oleh KH. M. Fadlil Pasantren Cikotok Dasuki. Namun kebangkitan NU di Tasikmalaya ditentang oleh penjajah Belanda, khususnya Perkoempoelan Goeroe Ngaji yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Selain itu, karena NU dianggap bersaing dengan Idzhar, aparat terus menekannya. Bahkan, tak hanya NU tapi juga khutbah KH. Mubarak dari Pasantren Suryalaya bertajuk "Godebag" ditutup. Untuk menyiasatinya, KH. M. Fadlil terus melakukan konsolidasi baik melalui pembahasan dengan Ajengan maupun melalui penunjukan pengurus baru. Penunjukan Juragan Ahmad sebagai Ketua PC NU Tasikmalaya adalah salah satunya. Namun, hal itu pun tak menyurutkan tekanan penguasa yang berujung bubarnya kepengurusan Juragan Ahmad.

Setelah itu, Ajengan NU Tasikmalaya KH. M. Fadlil mendatangi Juragan Soetisna Senjaya untuk ditawari menjadi ketua NU Tasikmalaya. Tanggapan Juragan Soetsen adalah "*Piraku Ketua NU Simkuring? Jalma Baragajul*". Namun, semua orang di Ajengan sepakat bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk memimpin NU Tasikmalaya.

Di Jajaway Jl. Dewi Sartika, tahun 1932 diadakan sidang NU di HIS

---

<sup>6</sup> Edi Kusmayadi, *Pergesekan Sikap Politik Masa NU PPP Dan PKB* (Tasikmalaya, 2016).

Pasundan II. Diputuskan dalam rapat bahwa. Juragan Soetsen dan KH. Syabandi Pasantren Cilenga mengambil alih sebagai Ketua PC NU dan Rois Syuriah. Jurhgana Soetsen bersedia menjadi Ketua PCNU dengan syarat, KH. O.Hoelaemi (Pak Emi) sebagai sekretarisnya. H. Masduki terpilih sebagai Wakil Ketua, dan Tabi'i terpilih sebagai Wakil Sekretaris. KH saat ini Zaenal Mustafa Pasantren Sukamanah diusung mewakili NU di Suriah. oleh penjajah Belanda. Perkembangan NU di Tasikmalaya terus berkembang dan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Peran NU di Kabupaten Tasikmalaya relatif aktif dalam politik dan dikenal sebagai ormas Islam yang berpengaruh bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang menjabat dari tahun 2019-2024 merupakan anggota dari PCNU Kabupaten Tasikmalaya, mengingat pentingnya pendidikan politik di era demokrasi saat ini dan pentingnya pendalaman lebih lanjut peran NU dalam pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya. Meski demikian, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keislaman yang juga dianut oleh organisasi NU, tentunya memberikan warna yang berbeda dalam cara dan pemikiran yang digunakannya untuk menjalankan peran pendidikan politik, khususnya di Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya.

PCNU Kabupaten Tasikmalaya mengadakan program yang berhubungan dengan Pendidikan Politik Kebangsaan. PCNU mengadakan beberapa program yaitu pelatihan dasar kader penggerak NU untuk tingkat Kecamatan dan Ranting, pelatihan menengah yang diperuntukkan untuk pengurus NU di tingkat Cabang dan Wilayah, dan Nu mengadakan program akademi dalam pengkaderan. 3

Program ini menguatkan kader NU dalam Pendidikan Politik Kebangsaan, hal ini terjadi karena dalam program ini membentuk kader untuk berdasarkan pada Pancasila, UUD, dan Undang-undang yang berlaku. Adanya program ini dapat memberikan pemahaman mendalam kepada anggota NU untuk memahami lebih dalam Politik Kebangsaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana NU menjalankan perannya sebagai agen pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah tambahan bagi proses pembelajaran tentang kekuatan politik Indonesia. Secara alami, itu juga dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ilmu politik.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana peran Nahdlatul Ulama dalam Mengembangkan Politik Kebangsaan Di Kabupaten Tasikmalaya 2019-2022?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas pada bagian pembahasan agar penelitian ini lebih fokus. Berikut Pembatasan masalah yang ada dalam penelitian ini: Dalam penelitian ini pembahasan masalah hanya akan terbatas pada, Bagaimana Gerakan dan usaha yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam Usaha Mengembangkan Politik Kebangsaan di Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Gerakan dan usaha yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam Pengembangan Politik Kebangsaan di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Politik khususnya dalam diskursus Pengembangan Politik Kebangsaan.
3. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Sebagai bahan kajian bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan Pengembangan Politik Kebangsaan bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Sebagai bahan kajian bagi Nahdlatul Ulama khususnya untuk melakukan analisis terhadap efektifitas gerakan dan usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan Usaha Pengembangan Politik Kebangsaan di Kabupaten Tasikmalaya.
- 3) Sebagai bahan kajian di lingkungan akademik dalam memahami Pengembangan Politik Kebangsaan di Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya.

### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:



- 1) Sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk pengembangan khasanah keilmuan dalam disiplin ilmu politik khususnya dalam diskursus kajian tentang Pendidikan Politik Kebangsaan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menelaah kajian-kajian tentang partai politik lainnya.
- 2) Rancangan teoritis untuk mengkaji bagaimana gerakan dan usaha kedepannya untuk memberikan pendidikan politik kebangsaan kepada masyarakat.